ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PIHAK YANG TIDAK MEMPEROLEH HAK (Studi Putusan Nomor: 24/G/2013/PTUN-BL)

Pendaftaran tanah dalam hal ini jelas merupakan kegiatan yang bermaksud untuk memberikan tanda bukti berupa sertifikat hak atas tanah guna memberikan jaminan kepastian hukum. Namun disini terdapat permasalahan dimana tanah yang telah bersertifikat di kuasai oleh pihak yang tidak memperoleh hak dan dalam Putusan Nomor: 24/G/2013/PTUN-BL dimana Pemegang sertifikat digugat atau sebagai tergugat Intervensi II untuk dibatalkan sertifikat hak milik nya. dengan adanya penguasaan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih bagi pemegang hak atas tanah tersebut

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dikuasai oleh pihak yang tidak memperoleh hak dalam putusan Nomor: 24/G/2013/PTUN-BL, serta dilihat dalam perspektif hukum pidana dan hukum perdata pada kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam Putusan Nomor: 24/G/2013/PTUN-BL dan untuk mengetahui dan menganalisis dalam perspektif hukum pidana dan hukum perdata pada kasus.

Penulisan tesis ini menerapkan metode pendekatan *yuridis normatif* menggunakan data sekunder dengan spesifikasi *deskriptif analitis*. Analisis data menggunakan teknik *analisis kualitatif* dengan penarikan kesimpulan secara *induktif*.

Hasil penelitian menujukan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dikuasai oleh pihak yang tidak memperoleh hak dalam putusan Nomor: 24/G/2013/PTUN-BL Kepala Kantor Pertanahan dalam Penerbitan sertifikat telah memenuhi norma kepatutan, Tidak melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian serta tidak sewenang– wenang, Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Pemegang sertifikat beritikat baik secara nyata menguasainya sudah seharusnya dan sewajarnya dilindungi oleh Undang-Undang. Seseorang yang secara melawan hukum, menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain Pasal 385 KUHP, dan PRP 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau kuasanya. Dan suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian secara materil, kerugian tersebut dapat di tuntut dengan Pasal 1365 KUHPerdata.

Pemerintah harus revisi kembali peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terutama berkaitan di bidang pertanahan perlu di sesuai dengan keadaan dan kondisi sekarang ini.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Atas Tanah, Penguasaan Hak Atas Tanah.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR LEGAL HOLDERS OF THE LAND CONTAINED BY PARTIES WHO DO NOT GET THE RIGHT (Study of Decision Number: 24 / G / 2013 / PTUN-BL)

Land registration in this case is clearly an activity that intends to provide evidence in the form of land rights certificates in order to guarantee legal certainty. But here there is a problem where land that has been certified is controlled by a party that does not obtain rights and in Decision Number: 24 / G / 2013 / PTUN-BL where the certificate holder is sued or as a defendant Intervention II to cancel his certificate of ownership. Unauthorized land tenure can be detrimental to anyone especially for the holder of the land rights

The problem discussed in this study is the legal protection for holders of land rights controlled by parties who do not obtain rights in the decision Number: 24 / G / 2013 / PTUN-BL, and seen in the perspective of criminal law and civil law in the case. This study aims to determine and analyze the legal protection for holders of land rights in Decision Number: 24 / G / 2013 / PTUN-BL and to find out and analyze in the perspective of criminal law and civil law in cases.

Writing this thesis applies the normative juridical approach using secondary data with descriptive analytical specifications. Data analysis uses qualitative analysis techniques by drawing conclusions inductively.

The results of the study aimed that the legal protection for holders of land rights controlled by parties who did not obtain the rights in the decision Number: 24 / G / 2013 / PTUN-BL Head of the Land Office in Issuance of certificates had fulfilled the norms of propriety, did not violate the Principle of Accuracy and Accuracy as well as not arbitrary, does not violate the General Principles of Good Governance and the holder of a certificate of good credibility has actually mastered it properly and appropriately protected by law. Someone who unlawfully sells, exchanges land that is not his property to another party Article 385 of the Criminal Code, and PRP 51 of 1960 concerning the Prohibition of Use of Land without a Right of Permit or its proxy. And an act against the law that causes material damage, the loss can be sued by Article 1365 of the Civil Code.

The government must revise existing laws and regulations in Indonesia, especially related to the land sector, in accordance with the current conditions and conditions.

Keywords: Protection, Land Rights, Mastery of Land Rights.